

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan sebuah desa tidak akan terlepas dari peran seorang kepala desa dalam memimpin masyarakatnya. Semenjak adanya undang-undang No 22 tahun 1999 mengenai hak otonomi desa, kepala desa memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, dengan demikian kepala desa dapat lebih leluasa untuk mengatur daerah dan masyarakatnya.

Kepala desa memiliki berbagai cara untuk memajukan daerahnya, dapat melalui beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di daerahnya, seperti karang taruna, PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya dan melalui program-program yang telah direncanakan. Organisasi PKK ada disetiap tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat RW hingga tingkat provinsi, organisasi PKK sering dilibatkan dalam program-program pemerintahan, seperti pemberdayaan dan pembangunan. PKK memiliki kepanjangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang dimana didalamnya tidak hanya tentang pemberdayaan saja, namun bagaimana PKK dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peraturan dalam Negeri Republik Indonesia no 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, pasal 1 no 5 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

PKK memiliki 10 Program Pokok PKK yang meliputi, (1) penghayatan dan pengamalan pancasila, (2) Gotong Royong, (3) Pangan, (4) Sandang, (5) Perumahan dan tata laksana rumah tangga, (6) Pendidikan dan keterampilan, (7) Kesehatan, (8) Pengembangan kehidupan berkooperasi, (9) kelestarian lingkungan hidup, dan (10) Perencanaan sehat. Uraian program pokok PKK dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Salah satu cara kepala desa untuk memberdayakan masyarakatnya adalah melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat atau yang disingkat dengan RBM, RBM sepenuhnya dikelola oleh PKK yang tetap diawasi dan dipantau oleh kepala desa. Tim penggerak PKK yang dimana lebih berfokus kepada pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam gerakan PKK dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap dirinya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat jumlah perempuan pada tahun 2016 berjumlah 804.025 jiwa, namun jumlah tersebut merupakan jumlah perhitungan umum yang artinya tidak dicantumkan berdasarkan usia. Begitu juga jumlah perempuan di Kecamatan Parongpong yang berjumlah 52.213 jiwa. Namun dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa potensi kemajuan sebuah desa bisa dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia, dengan demikian dapat dimaksimalkan potensi yang ada pada masyarakat perempuan. Selain itu, jumlah peserta dalam program RBM berjumlah 19 orang, yang 3 diantaranya merupakan bukan warga Desa Cihanjuang, dari data-data tersebut potensi untuk memaksimalkan upaya dalam mensejahterakan masyarakat masih sangat besar.

Banyak permasalahan yang ditemukan di organisasi PKK dalam pemberdayaan perempuan melalui program RBM, permasalahan tersebut diantaranya jumlah kader PKK yang berjumlah lebih dari 150 orang, namun hanya beberapa saja yang dinilai

aktif, di dalam penyelenggaraan program RBM, jumlah anak yang diterapi berjumlah 19 anak, 3 anak diantaranya bukan warga desa Cihanjuang, di Desa Cihanjuang terdiri dari 15 RW, dan 64 RT dengan jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang memiliki keterbatasan (*difabel*) dan membutuhkan terapi akan bertambah jumlahnya. Besarnya peran seorang kepala desa terhadap keberhasilan program RBM sangatlah berpengaruh, dengan jumlah anak yang diterapi berjumlah 19 anak, mereka mendapat fasilitas yang sangat baik, bahkan telah mendapat bantuan berupa biaya pengobatan dan kursi roda.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Perempuan melalui Program RBM di Desa Cihanjuang”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi, diperoleh beberapa permasalahan diantaranya:

- a. Jumlah peserta yang diterapi berjumlah 19 anak, 3 anak diantaranya bukan warga Desa Cihanjuang.
- b. Jumlah therapis yang hanya 1, menjadi keterbatasan dalam pelaksanaan program RBM.
- c. Warga Desa Cihanjuang terutama para ibu yang masih malu mengakui anaknya memiliki kebutuhan khusus, sehingga hal ini cukup menyulitkan PKK dalam mengidentifikasi warganya.

C. Rumusan Masalah

“Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Perempuan melalui Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) di Desa Cihanjuang?”

D. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana peran kepala desa Cihanjuang dalam pemberdayaan perempuan melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) ?
- b. Bagaimana strategi kepala desa Cihanjuang dalam pemberdayaan perempuan melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) ?
- c. Bagaimana manajemen yang diterapkan pada program rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peran kepala desa dalam pemberdayaan perempuan melalui program rehabilitasi masyarakat (RBM), sehingga anak-anak yang mendapat therapy mendapatkan fasilitas yang baik.
2. Strategi kepala desa dalam pemberdayaan perempuan melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) sehingga program RBM berjalan optimal.
3. Manajemen yang diterapkan dalam program rehabilitasi masyarakat (RBM) sehingga program RBM berjalan optimal.

F. Manfaat Penelitian**a. Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan sarana meningkatkan wawasan di bidang pemberdayaan perempuan
- 2) Sebagai upaya pengembangan organisasi-organisasi masyarakat dan program-program untuk masyarakat.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pengetahuan tentang pendidikan masyarakat khususnya dibidang pemberdayaan perempuan
- 2) Sebagai sara mengembangkan pengetahuan mengenai program dan organisasi masyarakat.

G. Definisi Operasional

1. Peran

Menurut Soekanto (2010:212), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu telah menjalankan suatu peran.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Kepala Desa Cihanjuang dalam pemberdayaan perempuan melalui gerakan PKK di Desa Cihanjuang.

2. Kepala Desa

- a. Menurut pendapat Suriningrat (2001:64) Kepala Desa adalah penguasa tunggal didalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.
- b. Menurut undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong

3. Pemberdayaan

a. Menurut Zubaedi (2013:24) pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

b. Berdasarkan undang-undnag No 6 tahun 2014 tentang Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayan perempuan melalui gerakan PKK di Desa Cihanjuang.

4. Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) menurut Slamet (1998) adalah “Aktivitas rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan suber daya manusia. Dengan kata lain, bahwa aktivitas rehabilitasi didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan masyarakat”. RBM menggunakan peran masyarakat dan keluarga dengan cara mengikut sertakan, menggerakan, atau memobilisasikan potensi sumber daya masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut kegiatan. RBM ialah suatu upaya peningkatan kesejahteraan sosial

penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara utuh dan terpadu oleh unsur masyarakat desa / kelurahan melalui pelatihan dan rujukan agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam masyarakat.

5. Manajemen

Manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan kegiatan baik, bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Sudjana, 2010)

6. Organisasi PKK

Berdasarkan Permendagri No 1 tahun 2013, PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Organisasi PKK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi PKK Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai langkah-langkah penulisan skripsi ini, penulis mengkasifikasikan kedalam beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, menjelaskan tentang kepemimpinan, pemberdayaan, manajemen, program rehabilitasi masyarakat dan teori pendidikan luar sekolah.

BAB III Metode Penelitian, yang meliputi desain penelitian, subyek penelitian, dan analisis data

BAB IV Hasil dan Pembahasan, yang meliputi hasil penelitian dan pembahasan penelitian

BAB V Simpulan dan Saran, memaparkan kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian, dan memberikan saran untuk kemajuan pendidikan.